

## **EDUCATION PROGRAM EVALUATION ON ACCOUNTABILITY REPORT ON THE GOVERNMENT INSTITUTIONS PERFORMANCE**

**Faisal Madani**

Sekretariat Dirjen PAUDNI, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan  
JL. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta  
fais\_madani@yahoo.com

### **Abstract**

*The research on the accountability report on the government institutions performance (LAKIP) was intended as valuable and appropriate document for the decision makers in all government institution. The result of report was taken from the qualitative research. The study used the evaluation model of CIPO referring to Context, Input, Process, and Output. The study was conducted at the Non Formal and Informal Directorate General, Ministry of National Education and Culture, the Education Office at the West Java and Banten Province in 2011. The study found that based on context evaluation, LAKIP was assumed having very strategic and important role as the fundamental evaluation instrument which could be applied in all institutions. The study also found that there were two problems in the implementation of the LAKIP's role. The problems were: (1) some government employees still had low knowledge on the LAKIP's role and function, and (2) LAKIP's format used to measure the institution performance was still incomplete. Meanwhile, based on the components of input, process, and output evaluations, LAKIP were found proper as a formal report; yet, the content of the report was not optimally used as the standard or criteria in designing and revising any policies and decisions made by the decision makers. The study suggested that the staff's role and capacities in the Directorate of Planning and Evaluation of PAUD in the Education Office at the West Java and Banten were upgraded based on well-planned and continuing program.*

**Keywords:** *program evaluation, accountability of the performace, CIPO model*

## **EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**Faisal Madani**

Sekretariat Dirjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
JL. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta  
fais\_madani@yahoo.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai dokumen yang digunakan oleh pengambil keputusan (*decision oriented*) yang cocok bagi pimpinan di setiap birokrasi pemerintah dengan menggunakan pendekatan evaluatif model CIPO (*Context, Input, Process, and Output*). Penelitian dilakukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Nonformal dan Informal dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Banten tahun 2011. Temuan utama dalam penelitian ini pada komponen konteks antara lain bahwa LAKIP memiliki kedudukan yang penting dan strategis serta landasan konseptual yang kuat sebagai instrumen evaluasi program yang dilaksanakan oleh setiap Kementerian dan Lembaga Pemerintah. Namun pemahaman dan pelaksanaan serta operasionalisasinya yang masih banyak memiliki kelemahan antara lain: masih rendahnya pemahaman aparat terkait tentang peran dan fungsi LAKIP, format LAKIP masih perlu dilengkapi dengan instrumen turunan yang lebih rinci dan operasional untuk mengukur kinerja. Komponen input, proses, dan output LAKIP secara administrasi selalu dapat dipenuhi sebagai sebuah laporan resmi, namun hasil LAKIP belum optimal dijadikan sebagai acuan dalam menyusun dan memperbaiki kebijakan pembangunan. Berdasarkan penelitian ini diusulkan agar peningkatan kapasitas (*capacity building*) untuk aparat terkait di bagian perencanaan dan evaluasi program di Direktorat PAUDNI dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Banten perlu dilakukan secara terprogram dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Akuntabilitas kinerja, model CIPO

### **PENDAHULUAN**

Program pembangunan pada sektor pendidikan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010 - 2014, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan

berkesinambungan. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 menjadi pedoman bagi semua tingkatan pengelola pendidikan dalam merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan Pendidikan (Kemendiknas, 2010: 1-2). Hal ini diperjelas Depdagri, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), Badan Perencana Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bahwa perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional dan global (LAN, 2011: 4).

Oleh karena itu, salah satu aspek penting dalam upaya pengembangan program dan kegiatan pendidikan adalah peningkatan tata kelola dan pengawasan serta akuntabilitas kinerja kelembagaan pemerintah pusat maupun daerah, lembaga eksekutif, lembaga legislatif, maupun yudikatif. Masyarakat harus mengetahui dan turut berpartisipasi dalam upaya peningkatan tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi program pendidikan.

Untuk mengukur kinerja keberhasilan pembangunan pada sektor pendidikan menempatkan LAKIP sebagai instrumen penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah kepada masyarakat secara transparan. Keberadaan LAKIP diperlukan dalam penyusunan program pendidikan tetapi sekaligus dapat menjadi suatu titik-tolak untuk mengetahui sejauh mana telah terjadi perubahan-perubahan akibat ditetapkannya berbagai kebijakan. Selain itu, LAKIP dapat menjadi bahan pertimbangan perlu tidaknya dilakukan perubahan yang bersifat bertahap maupun insidental. Dengan demikian, LAKIP dapat ditentukan keberhasilan maupun kegagalan baik dari perencanaan program maupun dalam pelaksanaan program (LAN, 2003: 19).

Ketersediaan data dan informasi yang dituangkan dalam LAKIP dicirikan oleh sifat akurat, lengkap, relevan dan tepat waktu tersebut dimungkinkan apabila terdapat suatu mekanisme kerjasama dan koordinasi dalam melakukan evaluasi dan monitoring yang saling mendukung di antara berbagai pihak terkait. Indikator adanya kerjasama dan koordinasi yang efektif dan efisien diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan program dan tercermin dalam LAKIP yang merupakan pertanggungjawaban dari pelaksanaan program.

Proses penyusunan LAKIP dilaksanakan setelah melakukan pengumpulan data dan informasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dituangkan dalam bentuk LAKIP. Pengembangan instrumen monev sebagai operasionalisasi instrumen LAKIP menjadi penentu keberhasilan evaluasi program. Selanjutnya LAKIP digunakan atau diberdayakan dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan dalam sektor pendidikan. Hasil pelaksanaan monev juga dapat berfungsi sebagai input untuk memperbaiki perencanaan program pada saat program tersebut diimplementasikan (*planned change*) melalui surat edaran atau memperbaiki *Standard Operational Procedure* (SOP). Terjalinnya kerjasama

dan koordinasi akan menghindari kemungkinan adanya kesimpangsiuran data maupun duplikasi informasi dalam penyusunan program yang akan datang.

Keberadaan LAKIP dan mekanisme penyusunannya yang terjadi saat ini diasumsikan memiliki perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perbedaan tersebut di antaranya merupakan wujud dari beragamnya kemampuan dan kepedulian sejumlah tenaga perencana (aparatur) maupun sistem perencanaan yang ada selama ini. Di samping itu, potensi dan kebutuhan yang secara spesifik dimiliki oleh masing-masing daerah turut memberikan kontribusi bagi beragamnya penilaian kinerja melalui LAKIP.

Namun demikian, pada masa peralihan otonomi daerah dewasa ini pada umumnya di daerah masih dijumpai hal-hal yang mengindikasikan belum jelasnya mekanisme kerja dinas pendidikan, beragamnya keberadaan unit perencanaan dan evaluasi pendidikan dalam struktur organisasi dinas bahkan masih banyak daerah yang belum memiliki unit evaluasi program, minimnya tenaga perencanaan dan *monev* yang memiliki kemampuan pada bidang perencanaan, kesimpangsiuran alur pengadaan, penyusunan dan pemanfaatan data dan informasi serta *monev* dalam penyusunan program pendidikan maupun keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai program pendidikan.

Agar program pendidikan yang ideal tersebut dapat terwujud, berbagai tingkatan kemampuan tenaga sumberdaya perencana pendidikan akan menjadi titik berangkat (*point of departure*) bagi sumberdaya tenaga perencana yang sesuai dengan profil program pembangunan pendidikan yang diharapkan berdasarkan hasil evaluasi program pendidikan yang telah dilaksanakan.

Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi program pendidikan. Joint Committee (1991: 13) mendefinisikan, evaluasi program merupakan kegiatan evaluasi yang menafsirkan kegiatan pendidikan dalam memberikan pelayanan pada suatu dasar yang kontinu dan sering melibatkan tawaran-tawaran kurikuler. Patton (1997: 23) mempertegas bahwa evaluasi program sebagai kegiatan pengumpulan data secara sistematis tentang aktivitas-aktivitas, karakteristik, dan hasil dari suatu program, untuk selanjutnya dipakai untuk membuat keputusan tentang program tersebut, meningkatkan efektivitas program, dan atau menginformasikan masa depan program. Evaluasi program merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk memberi penilaian terhadap keberhasilan atau efektivitas suatu program berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, untuk selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas program tersebut.

Evaluasi program pendidikan bertujuan untuk mengukur keberhasilan program yang telah dilaksanakan sesuai dengan laporan dalam rangka penyusunan program-program sektor pendidikan yang didasarkan pada ketersediaan data/informasi baik yang terkait langsung dengan data-data kependidikan maupun data-data non kependidikan (data-data potensi daerah) yang telah diwujudkan dalam bentuk laporan (LAKIP) yang menyentuh pada pemecahan masalah yang dihadapi di daerah di satu pihak dan mengapresiasi visi

pengembangan pendidikan di pihak lain. Dalam melakukan evaluasi program pendidikan berbasis LAKIP dilakukan serangkaian kegiatan penelitian, terhadap beberapa dokumen yang berkaitan langsung dengan penyusunan LAKIP yaitu: (1) Renstra 2010-2014 Kementerian Pendidikan Nasional, (2) Renstra 2010-2014 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, (2) Renstra 2010-2014 Direktorat PAUD, (3) Renstra dan 2010-2014 Direktorat Pendidikan Masyarakat, (4) Renstra 2010-2014 Direktorat Pendidikan Kesetaraan, (5) Renstra 2010-2014 Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. Dokumen Rencana Kerja Tahunan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal tahun 2010-2014, Dokumen Rencana Kerja Tahunan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal tahun 2010-2014.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektifitas pelaksanaan pembangunan sektor pendidikan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Banten, dalam rangka penyempurnaan (*to improve*) perencanaan dan implementasi program pendidikan nonformal. Penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPO yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael (1987: 204).

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini dilakukan dengan pendekatan evaluatif terhadap dokumen yang berkaitan dengan indikator-indikator sistem akuntabilitas pengukuran kinerja instansi pemerintah. Melalui laporan kinerja instansi ini diketahui ketercapaian setiap rencana program dan kegiatan yang telah ditargetkan yang selanjutnya, menjadi bahan pertimbangan bagi pelaksanaan program tahun atau periode berikutnya.

Penelitian ini dilaksanakan di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten pada bulan Mei sampai Agustus 2011.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian evaluatif dengan model CIPO dengan aspek yang dievaluasi dari komponen *context* terdiri dari: landasan formal, kebutuhan bidang pendidikan, perencanaan pembangunan bidang pendidikan; aspek yang dievaluasi dari komponen *input* terdiri dari: perencanaan strategis, perencanaan kinerja, dan kebijakan program; aspek yang dievaluasi dari komponen *process* terdiri dari: proses pengukuran pencapaian sasaran, dan proses pengukuran kinerja kegiatan; dan aspek yang dievaluasi komponen *output* terdiri dari: laporan akuntabilitas kinerja, dan pemanfaatan laporan dalam perencanaan berikutnya.

Data diperoleh melalui studi dokumen, dan pedoman wawancara terbuka, dengan responden: Direktorat Jenderal pendidikan anak usia dini non informal (PAUDNI), Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, dan Dinas Pendidikan

Propinsi Banten. Aspek yang dievaluasi terdiri dari: landasan formal, kebutuhan bidang pendidikan, dan perencanaan pembangunan bidang pendidikan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Konteks (*Context*)**

Temuan pada evaluasi konteks difokuskan pada aspek evaluasi landasan formal program, berupa Surat Keputusan Menteri dan Surat Edaran Menteri Aparatur Negara pada landasan program terdapat kelemahan yang mengatur mekanisme operasional LAKIP di setiap satuan kerja instansi pemerintah pada umumnya. Kelemahan tersebut, yakni bahwa pelaksanaan LAKIP selama ini hanya berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Negara dan susunan organisasi, tugas dan fungsi eselon 1 Kementerian Negara, yang lebih khusus dalam pemberian pelayanan di sektor pendidikan.

Temuan pada landasan formal berupa peraturan pemerintah di atas, mengungkapkan bahwa isi yang tersurat pada peraturan pemerintah tersebut hanya memuat aturan-aturan normatif yang sulit dilaksanakan dan belum terukur. Untuk itu, perlu pengembangan instrumen pendukung sebagai turunan (derivasi) dari format-format evaluasi kinerja dalam LAKIP yang dilaksanakan dalam kegiatan monev. Secara konseptual LAKIP disempurnakan dengan pengembangan berbagai instrumen evaluasi program yang lebih operasional, yang menunjukkan bahwa kebijakan pemerintan melalui kementerian Aparatur Negara belum optimal melakukan kajian dan monitoring terhadap LAKIP. Selain itu, belum ada peningkatan kapasitas pada lembaga yang mempunyai kewajiban dalam menyusun LAKIP sehingga mengakibatkan tidak akuntabelnya proses penyusunan LAKIP dan akuntabilitas kinerja pada satuan kinerja instansi pemerintah pada semua faktor pembangunan, khususnya di Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal Indonesia.

Dengan mengacu pada LAKIP seharusnya dapat dikembangkan berbagai instrumen evaluasi program yang lebih operasional dalam setiap satu tahun kewajiban dalam memberikan proses akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam semua sektor harus dimonitoring karena akan berdampak pada perwujudan *good governance*. Pada aspek lain pembinaan terhadap proses penyusunan LAKIP sebagai bentuk akuntabilitas menjadi keharusan dalam memenuhi kebutuhan akan transparansi proses akuntabilitas kinerja pemerintah selama ini.

### **Masukan (*Input*)**

Temuan pada evaluasi masukan ditemukan proses rencana strategis lebih banyak ditentukan dari Rencana Kerja Pemerintah, sehingga dokumen Rencana Strategis Kementerian dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal tidak digunakan

dalam penyusunan program kerja. Siklus perencanaan kinerja kementerian ditentukan oleh rencana kerja pemerintah.

Temuan yang mengungkapkan bahwa kondisi kelembagaan dalam pelaksanaan kinerja menjadi sesuatu yang sangat menentukan karena keberadaan sumberdaya kelembagaan yang optimal akan menentukan pelaksanaan kebijakan proses kinerja yang optimal dan pencapaian program yang efisien dan efektif dalam semua sektor pembangunan khususnya bidang pendidikan.

Temuan selanjutnya adalah pada aspek kelembagaan pada Dinas Pendidikan di Provinsi, penentuan eselon IV pada dinas pendidikan provinsi untuk perencanaan, penyusunan dan evaluasi program sangat menyulitkan untuk melakukan koordinasi, terutama untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dengan instansi lain yang terkait, misalnya untuk program PAUD dengan instansi kesehatan dan BKKBN, sehingga banyak terjadi duplikasi program.

Peningkatan kinerja harus didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari jumlahnya maupun dari kualitasnya melalui berbagai pelatihan dan pembinaan meskipun staf yang ada berasal dari berbagai latar belakang pendidikan. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM yang menangani perencanaan dan evaluasi program masih sangat terbatas tingkat pendidikannya di mana kebanyakan lulusan SMA maupun yang sudah selesai strata 1 (S1). Temuan lainnya adalah kurang minatnya tenaga yang berkualifikasi baik ditempatkan di bagian pendataan dan perencanaan dan evaluasi program. Prinsip peningkatan kinerja instansi pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa proses kinerja akan optimal dalam melaksanakan kebijakan program harus didukung dengan SDM dan dana yang memadai untuk melakukan monitoring dan evaluasi dan proses penyusunan LAKIP.

Kualifikasi tenaga perencana dilihat dari latar belakang pendidikan maupun pengalaman bekerja dan pelatihan yang dimiliki sejumlah tenaga yang berperan pada unit perencanaan pada struktur organisasi sangat minimal. Solusi terhadap masalah ini kepala dinas menempatkan konsultan untuk membantu penyusunan perencanaan di sub bagian perencanaan dan evaluasi program. Hal ini membuat ketiadaan SDM pada unit perencanaan struktur organisasi berdampak pada ketidakharmonisan lingkungan kerja serta mubazirnya penguasaan keterampilan maupun pengetahuan yang telah terbina selama sekian waktu oleh SDM perencana.

Hal ini menimbulkan infisiensi dan ketidaknyamanan suasana kerja di kalangan kelompok yang terkait, bahkan dapat dikatakan merupakan kenyataan kontra produktif yang sebetulnya dapat dihindari. Ada suatu hal yang positif apabila timbul pemikiran untuk merumuskan alternatif perubahan struktur disesuaikan dengan ketersediaan sumberdaya manusia dan potensi pendukung lainnya maupun tuntutan kebutuhan daerah.

Instrumen yang digunakan adalah analisis dokumen yakni: Penelusuran dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal PAUDNI Nonformal dan Informal, dokumen Rencana Kerja Tahunan, dan dokumen laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dan instrumen angket dengan responden: bagian perencanaan, sub direktorat evaluasi program. Jenis angket yang digunakan berbentuk angket pilihan ganda dengan empat kemungkinan jawaban dan angket pilihan jawaban yang menggunakan skala lima. Aspek yang dievaluasi terdiri dari: perencanaan strategis, perencanaan kinerja, dan kebijakan program.

### **Proses (Process)**

Dari aspek pengukuran kinerja, temuan penelitian mengungkapkan bahwa rencana dan realisasi program 2010 dikelompokkan berdasarkan pilar: pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta peningkatan tatakelola (akuntabilitas).

Berdasarkan aspek proses kinerja lebih diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam mewujudkan aspek proses kinerja hanya ditunjukkan dari hasil laporan dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Temuan hasil penelitian penyusunan laporan disesuaikan dengan tuntutan dari instansi pemeriksa, yang lebih menekankan pada proses audit, dan lebih menyoroti dari proses pertanggungjawaban penggunaan dana serta hasil yang dicapai sebagai wujud pelaporannya.

Temuan penelitian di atas menunjukkan bahwa hasil dokumen LAKIP yang ada pengukuran kinerjanya dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi satuan kerja pada pembangunan bidang pendidikan. Selain itu, penilaian/evaluasi LAKIP untuk kepentingan menentukan akuntabilitas kinerja dan transparansi proses pembangunan, secara umum akan dilakukan oleh instansi pemerintah yang memiliki wewenang penuh dalam mencapai indikator makro proses kinerja bidang pendidikan dan menjadi titik ukur yang paling terkecil. Indikator mikro pencapaian kinerja menjadi salah satu indikator penentu dari keberhasilan kebijakan kinerja satuan kerja bidang pembangunan pendidikan.

Pembahasan selanjutnya adalah evaluasi pada aspek kerangka pengukuran kinerja yang memuat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja dan cara pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan terhadap program dan kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja meliputi indikator sasaran program dan indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator kinerja masukan, keluaran, dan hasil.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket, wawancara, dan dokumentasi, dengan responden: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) yang meliputi: Kepala bagian perencanaan, Kasubdit program dan evaluasi, Kasubag monitoring dan evaluasi, Kasubag data



dan informasi, Kabag serta Kasubag perencanaan dan program; dan dinas pendidikan propinsi Jawa Barat dan Banten yang meliputi: Kasubag data dan informasi, Kasubag perencanaan program, Kasubdin pendidikan nonformal dan informal, Kasi monitoring dan evaluasi, dan kasi perencanaan program. Aspek yang dievaluasi terdiri dari: proses pengukuran pencapaian sasaran, dan proses pengukuran kinerja kegiatan.

### **Keluaran (*Output*)**

Evaluasi *output* menunjukkan hasil capaian kinerja dan sistem tata kelola yang handal, sehingga dapat menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan non formal, penyediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non formal, penyediaan layanan pendidikan kesetaraan, penyediaan layanan pendidikan masyarakat, penyediaan layanan kursus dan pelatihan dan layanan pengkajian pengembangan serta pengendalian mutu Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) telah menunjukkan capaian kinerja yang sangat signifikan dengan proses perencanaan kinerja dan kebijakan pada satuan kerja instansi pemerintah dalam bidang pembangunan khususnya pendidikan.

Hasil akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di atas, menunjukkan hasil evaluasi capaian kinerja yang rata-rata mencapai 100%. Pada prinsipnya akuntabilitas kinerja tergambar pada pencapaian program-program kegiatan dibidang pendidikan nonformal dan informal yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan lembaga kemasyarakatan lain. Secara umum pada tahun 2010 pelaksanaan program berjalan sesuai dengan perencanaan kinerja dan indikator capaian kinerja yang telah distandarkan oleh satuan kerja melalui standar operasional prosedur.

Secara umum, aspek capaian kinerja hasil program terfokus pada sasaran strategis baru terealisasi 75%. Capaian tersebut disebabkan oleh faktor sumber daya kelembagaan yang belum mendukung tingkat pencapaian kinerja satuan kerja instansi pemerintah di bidang pendidikan nonformal dan informal, hasil temuan penelitian inipun menjadi bukti pencapaian kinerja dalam perencanaan dan evaluasi kinerja yang komprehensif.

Aspek evaluasi kinerja lebih difokuskan pada proses pelaporan yang menjadi bagian dari proses akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di bidang pendidikan, lebih memuat pada komponen; pengalokasian dana pemerintah melalui Anggaran Perencanaan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD), pemanfaatan dana secara maksimal sesuai dengan rencana program dan penggalian dana non pemerintah atau dari pihak swasta belum berjalan secara optimal dengan keberadaan tanggung jawab lembaga non pemerintah dalam memberikan sumbangsih keikutsertaannya dalam pembangunan bidang pendidikan.

Capaian kinerja dalam bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran pembangunan memberikan gambaran hasil kinerja dalam kategori baik. Dengan mengoptimalkan sumberdaya kelembagaan yang ada dan ditata dengan sistem pengelolaan yang sistematis sehingga pelaksanaan pengembangan yang berprinsip pada efisien dan efektif dapat mencapai kinerja yang lebih baik.

Unit perencanaan menunjukkan bahwa LAKIP bukan merupakan penentu akhir penetapan program yang dipilih untuk dilaksanakan di tahun berikutnya. Keberhasilan pengajuan usulan program bergantung pada kemampuan anggaran rutin dan nonrutin yang dialokasikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Oleh karena itu, usulan program hendaknya disusun berdasarkan skala prioritas dengan penjelasan rinci mengenai kebutuhan anggaran yang disesuaikan dengan perkiraan total anggaran yang diusulkan. Kepiawaian dan kepemimpinan Kepala Dinas dalam melakukan negosiasi dengan pihak BAPPEDA, kepala daerah, dan DPRD sangat menentukan keberhasilan perencanaan dan penganggaran pembangunan. Tentunya, LAKIP juga menjadi penting untuk ditunjukkan dalam memperkuat alasan penyusunan anggaran, namun masih belum maksimal digunakan.

Kemitraan dengan berbagai institusi formal yang terkait dapat dibangun melalui pendekatan personal maupun institusional sebagaimana yang telah terjadi dengan pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Misalnya, mengundang pihak DPRD dalam pertemuan terbatas sebelum program diusulkan secara resmi berdasarkan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Sementara itu tipisnya kepercayaan pihak swasta maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap kinerja pemerintahan menggiring pada perlunya prakarsa untuk merangkul unsur dari berbagai pihak seperti perguruan tinggi, perguruan swasta, perusahaan, LSM, pihak pemerintah maupun dari unsur *stakeholders*.

Dana yang dialokasikan untuk pendidikan cukup besar, pada dasarnya kurang tepat mengingat dimasukkannya pula berbagai pengeluaran rutin seperti gaji pegawai, pembangunan infrastruktur sehingga tidak jauh berbeda dengan alokasi anggaran pusat. Kenyataan ini merupakan akibat dari minimnya Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat, yang didasarkan pada pertimbangan luas wilayah. Harusnya dilihat dari kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nyata pada daerah tersebut. Dilihat dari skala prioritas pembangunan daerah menyebutkan bahwa sektor pendidikan menjadi prioritas pembangunan daerah, tampaknya masih banyak yang perlu dibenahi.

Peningkatan efisiensi penggunaan anggaran non rutin (proyek) maupun pemberdayaan potensi anggaran yang digali dari *stakeholders* pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan alternatif program yang realistis untuk dilaksanakan. Program yang layak dipikirkan dalam menggali sumber biaya *nonbudgeter* dari masyarakat, antara lain meliputi peningkatan peran dan fungsi organisasi *stakeholders*. Berdasarkan temuan-temuan dan

pembahasan hasil evaluasi program serta mempertimbangkan keterbatasan evaluasi, maka kesimpulan penelitian dikemukakan sebagai berikut:

Secara keseluruhan hasil evaluasi menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan penyusunan LAKIP berdasarkan kriteria standar objektif yang ditetapkan dalam penelitian.

## **SIMPULAN**

Dengan diberlakukannya pembangunan berbasis kinerja, maka penyusunan LAKIP menjadi salah satu instrumen teknis yang menjadi alat ukur keberhasilan pembangunan didukung oleh Surat Keputusan Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Surat Keputusan tersebut sebagai landasan operasional dalam menyusun dan menetapkan serta mengevaluasi keberhasilan penyelenggaraan pembangunan. Direkomendasikan LAKIP tetap digunakan sebagai kebijakan pemerintah untuk menjalankan prinsip *good government*, percepatan pemberantasan korupsi dan implementasi program yang lebih transparan dan professional. Selain itu institusi perlu melakukan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan dan eselonisasi di bidang perencanaan evaluasi dan pelaporan. 2) Masukan (*Input*), pertama, proses penyusunan rencana kinerja yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal PAUDNI telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Kedua, implementasi kebijakan program didukung dengan sumberdaya manusia. Direkomendasikan SDM perencana pendidikan memiliki kualifikasi sarjana S1, kesesuaian latar belakang pendidikan dan memahami prosedur rencana strategis. 3) Proses (*Process*), implementasi program dana dekonsentrasi telah berjalan secara efektif. Pengukuran kinerja belum berdasarkan hasil faktual karena belum menggunakan instrumen yang tepat dan koordinasi belum dilaksanakan pada setiap bidang perencanaan. Direkomendasikan instansi pemerintah melakukan pelatihan metodologi penelitian, mereposisi pandangan tentang kebijakan LAKIP, dan melakukan analisis situasi. 4) Keluaran (*output*), implementasi dana dekonsentrasi telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Untuk itu direkomendasikan melakukan pengendalian yang efektif monitoring dan evaluasi program agar sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Djaali, dan Pudji Muljono. (2008). *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Fitzpatrick, Jody L., Blaine R. Worthen dan J. R. Sanders. (1995). *Program Evaluation Alternative Approaches and Practical Guidelines*. New York: Pearson.

- Isaac, Stephen dan William B. Michael. (1987). *Handbook in Research and Evaluation: For Education and Behavioral Science*. California: Edits Publisher.
- Joint Committee Evaluation for Educational. (1991). *Standards for Evaluations of Educational Programs, Projects, and Materials*, terjemahan oleh Rasdi Ekosiswoyo. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Madaus, G. F, M. S. Scriven, dan D. L. Stufflebeam (eds). (1985). *Evaluation Model: View-points on Educational and Human Service Evaluation*. Boston: Kluwernijhoff Publising.
- Owen, John M. (1193). *Program Evaluation, Form and Approaches*. New South Wales: Allen and Unwin Pty. Ltd.
- Patton, Michael Q. (1997). *Utilization-focused Evaluation: The New Century Text*. California: Sage Publication.
- Ruhe, Valerie dan Bruno D. Zumbo. (2009). *Evaluation in Distance Education and E-Learning*. New York: The Guilford Press.
- Rutman, Leonard. (1984). *Evaluation Research Methodology*. New Delhi: Sage Publication India, PVT. LTD.
- Scheerens, Jan., Cees Glas, dan Sally M. Thomas, dan Gilbert Sax. (1980). *Educational Evaluation Assesment and Monitoring, Systemic Approach*. Tokyo: Swets and Zeitlinger Publisher.
- Sudjana, Djuju. (2006). *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung: Program Pasca Universitas Pendidikan Indonesia dan PT. Remaja Rosdakarya.
- Sutikno, Muzayanah. (2009). *Evaluasi Program Pendidikan*. Handout Perkuliahan. Jakarta: PPS UNJ.
- World Bank. (2004). *Monitoring & Evaluation: Some Tools, Method, and Approaches*. Washington DC: World Bank. <http://www.mfcr.cz/cps/rde>.
- Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2010). *Rencana Strategis Kemen-terian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 "Melayani Semua dengan Amanah."* Jakarta: Kemendiknas RI.

Lembaga Administrasi Negara. (2003). *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: LAN.